

## ABSTRAK

### **Judul Penelitian: Strategi Pemberdayaan Komunitas Dalam Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik di Lingkungan Kabupaten Sumenep**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik di Kabupaten Sumenep, dengan fokus utama pada wilayah Kecamatan Batuan. Wilayah ini dipilih karena merupakan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) satu-satunya di kabupaten tersebut dan memiliki beberapa inisiatif lokal dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pemberdayaan yang berkembang di masyarakat, menelaah efektivitas pendekatan yang diterapkan (baik edukatif, ekonomis, maupun berbasis sosial budaya) serta menganalisis peran aktor-aktor lokal seperti pemerintah desa, LSM, dan komunitas lingkungan. Penelitian juga akan menggali tantangan serta peluang yang dihadapi dalam implementasi strategi pemberdayaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan kajian literatur. Subjek penelitian dipilih secara purposive, terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, pengelola bank sampah, warga, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, dan LSM lingkungan. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan, sekaligus menjadi referensi kebijakan berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Komunitas, Pengelolaan Sampah, Strategi Partisipatif.

## ABSTRACT

**Research Title:** *Community Empowerment Strategies in Organic and Inorganic Waste Management in Sumenep Regency*

This study aims to examine community empowerment strategies in the management of organic and inorganic waste in Sumenep Regency, with a primary focus on the Batuan sub-district. The area was selected due to its status as the location of the only Final Disposal Site (TPA) in the regency and the presence of various community-based waste management initiatives. The research is designed to identify forms of community empowerment, assess the effectiveness of the approaches employed—whether educational, economic, or socio-cultural—and analyze the roles of local actors such as village governments, NGOs, and environmental communities. Additionally, this study will explore the challenges and opportunities involved in implementing these empowerment strategies.

A qualitative approach with a case study method is employed. Data collection techniques include in-depth interviews, participatory observation, document analysis, and literature review. Research subjects are selected purposively, comprising village officials, community leaders, waste bank managers, residents, and representatives from the Environmental Agency and environmental NGOs. The data will be analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, involving stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of this study are expected to provide strategic recommendations for strengthening community-based waste management programs and to serve as a policy reference grounded in local wisdom and community participation.

**Keywords:** community empowerment, waste management, participatory strategy.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala hidayah, *ri'ayah*, (perlindungan) dan *maunah*-Nya (pertolongan), sehingga pada akhirnya tesis ini bisa rampung dan bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan. *Shalawatullah wasalamuhu* semoga tetap teralirderaskan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban ilmiah *bidinil Islam*.

Penulis menyadari bahwa karya dalam bentuk proposal penelitian ini sangat sulit dapat saya rampungkan tanpa bimbingan dan masukan-masukan yang berarti bagi semua anggota peneliti. Karenanya, dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT, Tuhan sekalian alam membalas kebaikan keduanya dengan kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Amin.

Saya berharap, Proposal penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi pengambilan kebijakan berkenaan dengan persoalan sampah di Kabupaten Sumenep. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, masukan dan kritik demi perbaikan karya ini sangat diharapkan. Terimakasih.

Sumenep, 14 Juni 2025

Imalah, M.H.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR RUMUS.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Penelitian Terdahulu.....	17
2.2 Kerangka Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN .....	30
2.1 Fokus Penelitian .....	30
2.2 Lokasi Penelitian.....	30
2.3 Sumber Data.....	31
2.4 Subyek Penelitian .....	32
2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	33
2.4 Teknik Analisis Data .....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	36
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	40
RENCANA ANGGARAN BIAYA.....	45
JADWAL WAKTU PENELITIAN .....	48
LAMPIRAN .....	

## **DAFTAR GAMBAR**

2.1	Pola Ukuran.....	6
2.2	Paragraf.....	8
2.3	Contoh Penulisan.....	10
2.4	Kutipan Satu Paragraf.....	12

## **DAFTAR TABEL**

2.1	Pola Ukuran.....	6
2.2	Paragraf.....	8
2.3	Contoh Penulisan.....	10
2.4	Kutipan Satu Paragraf.....	12

## DAFTAR RUMUS

2.1	Pola Ukuran.....	6
2.2	Paragraf.....	8
2.3	Contoh Penulisan.....	10
2.4	Kutipan Satu Paragraf.....	12

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Permasalahan sampah di Indonesia semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin krusial seiring meningkatnya aktivitas manusia dan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2024, total timbulan sampah di 312 kabupaten/kota mencapai 33,6 juta ton per tahun, dengan hanya 59,84% yang terkelola dan sisanya 40,16%, belum tertangani secara optimal (KLHK, 2024).

Dalam catatan Yayasan Indonesia Bersih (2023) dikatakan, bahwa dari seluruh jumlah sampah di Indonesia, hanya sekitar 13,5% yang berhasil didaur ulang, 12,2% dikomposkan, dan lebih dari 74% sisanya masih berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Banyak TPA di Indonesia telah berada dalam kondisi darurat daya tampung. Maka kondisi demikian tidak hanya menimbulkan permasalahan ekologis, seperti pencemaran tanah, udara, dan air, tetapi juga persoalan sosial dan kesehatan masyarakat. Akumulasi sampah menjadi sumber penyakit, menurunkan estetika lingkungan, serta berpotensi memicu bencana seperti pencemaran udara akibat menumpuk dan membusuknya sampah.

Pengelolaan sampah yang efektif menjadi tantangan besar, terutama di wilayah permukiman padat atau tempat sampah yang berdekatan dengan permukiman. Dalam konteks ini pendekatan pengelolaan sampah berbasis komunitas atau masyarakat menjadi semakin relevan. Strategi ini menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari pemilahan di sumber, pengumpulan, pengolahan, hingga pemanfaatan ulang sampah.

Demikian juga di Kabupaten Sumenep, permasalahan sampah juga menjadi perhatian serius. Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep

menunjukkan bahwa produksi sampah meningkat dari 32,50 ton per hari pada tahun 2021 menjadi 33,32 ton per hari pada tahun 2023. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah; Kabupaten Sumenep hanya memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, dengan luas satu hektar yang saat ini telah mengalami kelebihan kapasitas.

Pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan pembangunan berkelanjutan yang dihadapi daerah-daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sumenep. Dengan peningkatan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan keterbatasan sistem pengelolaan sampah yang ada, permasalahan sampah telah berkembang menjadi isu multidimensional yang membutuhkan pendekatan komprehensif (Jambeck et al., 2015; Purwendro & Nurhidayat, 2017).

Upaya penanganan sampah di Kabupaten Sumenep masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pemberdayaan komunitas yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik organik maupun anorganik. Pemberdayaan komunitas menjadi salah satu strategi yang dipandang efektif untuk menangani permasalahan sampah di tingkat akar rumput, dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam seluruh proses pengelolaan sampah (Arnstein, 2019; Mardikanto & Soebiato, 2019).

Pemberdayaan komunitas merupakan pendekatan yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Menurut teori pemberdayaan oleh Zimmerman (1995), pemberdayaan adalah proses yang memungkinkan individu dan komunitas memperoleh kontrol atas kehidupan mereka melalui akses terhadap informasi, sumber daya, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pengelolaan sampah, pemberdayaan komunitas berarti membekali masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan sarana untuk mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP) tahun 2022, pemberdayaan komunitas dapat menurunkan potensi sampah plastik terbuang ke laut hingga 30% apabila dilakukan secara sistematis dan masif di tingkat lokal (NPAP, 2022). Pemberdayaan komunitas yang baik juga sejalan dengan pendekatan *Community Based Development* (CBD) yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan.

Permasalahan sampah merupakan tantangan lingkungan yang semakin kompleks, terutama di era urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Sumenep, peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat. Sampah organik yang tidak terurai dengan baik berpotensi menghasilkan gas rumah kaca seperti metana, sementara sampah anorganik seperti plastik mencemari tanah dan perairan.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tentang pengelolaan sampah secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Dalam Pasal 28 UU tersebut, dinyatakan bahwa masyarakat berhak dan didorong untuk berperan serta dalam pengelolaan sampah, baik melalui kegiatan pengurangan, pemilahan, pemanfaatan kembali, maupun daur ulang. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meletakkan prinsip partisipatif sebagai dasar pengelolaan lingkungan secara adil dan berkelanjutan (Republik Indonesia, 2008).

Sejalan dengan amanat regulasi nasional tersebut, pemberdayaan komunitas lokal menjadi strategi penting dalam pengelolaan sampah, khususnya pada tingkat rumah tangga dan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mengurangi beban TPA (Tempat Pembuangan Akhir), tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan menciptakan nilai ekonomi dari sampah melalui model 3R (Reduce,

Reuse, Recycle). Dalam konteks Kabupaten Sumenep, strategi pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik menjadi semakin relevan, mengingat potensi partisipasi sosial yang kuat dari kelompok masyarakat seperti PKK, karang taruna, lembaga pendidikan, serta pesantren.

Dengan demikian, penguatan strategi pemberdayaan komunitas merupakan langkah krusial dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat sosial dan kultural. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi yang tepat dalam konteks lokal Kabupaten Sumenep, dengan mengacu pada kerangka hukum yang berlaku dan praktik-praktik baik yang sudah berkembang di masyarakat.

Pengelolaan sampah di Sumenep harus mengacu pada UU No. 18 Tahun 2008 dan peraturan turunannya, dengan pendekatan pemberdayaan komunitas. Peran aktif masyarakat, fasilitasi pemerintah daerah, dan dukungan kelembagaan adalah kunci keberhasilannya. Strategi ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal kemandirian ekonomi dan penguatan sosial.

Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan komunitas juga ditekankan oleh Arnstein (1969) melalui "Tangga Partisipasi Warga", yang menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari manipulasi hingga kontrol warga. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif dan bermakna dalam setiap tahapan pengelolaan sampah.

Implementasi strategi pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan sampah telah menunjukkan hasil positif di berbagai daerah. Misalnya, di Kota Malang, terdapat lebih dari 200 unit bank sampah yang berhasil mengurangi volume sampah anorganik hingga 25% dan menciptakan penghasilan tambahan bagi sekitar 4.500 kepala keluarga. Namun di Kabupaten Sumenep, inisiatif serupa masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan pengelolaan sampah daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah, seperti merencanakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di tujuh kecamatan yang menghasilkan

sekitar 36 ton sampah per hari. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.

Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya tujuan ke-11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan, dan tujuan ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kondisi pengelolaan sampah organik dan anorganik di Kabupaten Sumenep?
- 2) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan Kabupaten Sumenep?
- 3) Bagaimana faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep?
- 4) Bagaimana strategi pemberdayaan komunitas yang efektif dalam meningkatkan pengelolaan sampah organik dan anorganik di Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mendeskripsikan kondisi terkini pengelolaan sampah organik dan anorganik di Kabupaten Sumenep.
- 2) Untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep.

- 3) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep.
- 4) Untuk merumuskan strategi yang efektif dalam pemberdayaan komunitas untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Sumenep.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian strategi pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik di lingkungan Kabupaten Sumenep ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis:**

- a) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan secara partisipatif.
- b) Menjadi hazanah intelektual dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

##### **2. Manfaat Praktis:**

- a) Memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.
- b) Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah telah banyak dilakukan, baik dalam konteks nasional maupun lokal, termasuk di Kabupaten Sumenep. Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu diperlukan untuk mengetahui posisi riset yang akan dilakukan, serta untuk mengidentifikasi celah (gap) yang dapat diisi oleh penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Desahariyanto, Fansuri, dan Diana (2021) melakukan penelitian tentang strategi pengelolaan sampah di Desa Pinggirpapas, Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam mendukung pengelolaan sampah, namun keterbatasan fasilitas TPS dan rendahnya kesadaran memilah sampah menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan strategi bertahan dengan peningkatan peran masyarakat, tetapi belum menyentuh aspek pemberdayaan komunitas secara menyeluruh.
- 2) Wati, Ekawati, dan Ratna (2022) dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Pandian, Sumenep, menunjukkan bahwa pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis ibu-ibu PKK mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam memilah dan mengolah sampah organik menjadi kompos. Namun, kegiatan ini bersifat sementara dan belum menunjukkan keberlanjutan pemberdayaan komunitas secara kolektif.
- 3) Penelitian oleh Aisyah (2020) di kawasan pesisir Kecamatan Ambunten menunjukkan bahwa praktik 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum dijalankan secara optimal oleh masyarakat pesisir. Kendala yang dihadapi

adalah keterbatasan fasilitas dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah berbasis komunitas.

- 4) Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa dari Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika) menunjukkan keberhasilan awal dalam membangun laboratorium sampah sederhana di Desa Marengan Laok dan Ellak Laok. Mereka juga memperkenalkan teknologi pembuatan pupuk organik dan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk keberlanjutan. Namun, keberhasilan ini belum didukung oleh penelitian yang mendalam mengenai efektivitas jangka panjang dari strategi pemberdayaan tersebut.
- 5) Pemerintah Kabupaten Sumenep juga telah menjalin kerja sama dengan PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk dalam mengelola sampah menjadi Refuse-Derived Fuel (RDF). Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam pengelolaan sampah berskala besar, namun pelibatan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan komunitas masih terbatas pada edukasi dan sosialisasi.
- 6) Selanjutnya, penelitian oleh Sabtawardani (2021) di Desa Kertasada menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini menandakan bahwa aspek edukasi menjadi salah satu komponen penting dalam pemberdayaan komunitas.

Dari keseluruhan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada berbagai inisiatif dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep, kajian secara khusus dan sistematis mengenai strategi pemberdayaan komunitas yang menyeluruh dan berkelanjutan, baik dalam aspek sosial, edukatif, maupun kelembagaan, masih belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan pendekatan pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik secara lebih terstruktur dan kontekstual sesuai dengan karakteristik Kabupaten Sumenep.

## **B. Konsep dan Definisi Pemberdayaan Komunitas**

### **1. Konsep Pemberdayaan**

Para ahli dalam bidang pengembangan masyarakat, pekerjaan sosial, dan studi pembangunan telah mencatat bahwa konsep pemberdayaan (empowerment) mengalami perubahan konseptual yang mendalam. Sejak tahun 1970-an, para ilmuwan mulai mengakui terminologi ini sebagai bagian dari wacana akademik yang sah. Pengakuan ini muncul sebagai respons kritis terhadap model pembangunan konvensional yang bersifat top-down dan tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan maupun implementasi kebijakan (Friedmann, 2018). Transformasi konsep pemberdayaan ini merefleksikan pergeseran paradigma pembangunan global, di mana orientasi pembangunan tidak lagi hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, melainkan bergerak menuju pendekatan yang lebih menyeluruh, inklusif, serta berkelanjutan dari aspek sosial dan ekologis.

Rappaport (1987) merupakan salah satu tokoh awal yang merumuskan definisi pemberdayaan. Ia mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses individu, organisasi, dan komunitas dalam memperoleh kendali atas aspek-aspek penting di kehidupannya. Dalam definisi ini, Rappaport menempatkan penguasaan dan kontrol sebagai komponen fundamental dari konsep pemberdayaan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Swift dan Levin (1987) mengartikan pemberdayaan sebagai sebuah proses yang memungkinkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk membangun kekuatan, meningkatkan rasa percaya diri, serta menggunakan kekuatan tersebut dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang mereka alami.

Dalam perkembangan teoritis berikutnya, para peneliti memperluas cakupan konsep pemberdayaan. Konsep ini tidak lagi hanya mencakup aspek kekuasaan dan kontrol, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas individu dan kolektif, peningkatan kesadaran kritis, serta dorongan untuk melakukan aksi kolektif. Zimmerman (2000) memberikan kontribusi penting dengan merumuskan kerangka konseptual pemberdayaan yang terdiri dari tiga dimensi utama: pertama, dimensi intrapersonal yang mencakup persepsi individu terhadap kompetensi dan

kendali dirinya; kedua, dimensi interaksional yang mencakup kesadaran kritis dan pemahaman terhadap konteks sosial dan politik di sekitarnya; dan ketiga, dimensi perilaku yang mencerminkan kemampuan individu atau kelompok untuk bertindak secara efektif dalam memengaruhi hasil. Melalui kerangka ini, Zimmerman menegaskan bahwa pemberdayaan bersifat multidimensional dan beroperasi secara simultan pada tingkat psikologis, sosial, dan struktural.

## **2. Definisi Pemberdayaan Komunitas**

Pemberdayaan komunitas merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat agar mampu mengelola dan mengarahkan perubahan sosial secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan komunitas pada perkembangannya merujuk pada penerapan prinsip pemberdayaan dalam lingkup kehidupan kolektif masyarakat. Para ahli dari berbagai disiplin ilmu telah mengajukan definisi yang beragam untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep pemberdayaan komunitas. Ife dan Tesoriero (2018) menjelaskan bahwa pemberdayaan komunitas merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh kapasitas dalam berpartisipasi secara aktif, merundingkan kepentingannya, serta memengaruhi dan mengelola institusi yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Mereka menekankan bahwa proses ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat melalui dukungan kekuasaan atau sumber daya yang sebelumnya tidak dimiliki oleh kelompok yang lemah.

Dalam perspektif yang berbeda, Mardikanto dan Soebiato (2019) memahami pemberdayaan komunitas sebagai proses sistematis yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat, baik secara individu maupun sosial, agar mereka mampu mandiri dan berdaya dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dalam pandangan ini, pemberdayaan merupakan hasil dari penguatan kapasitas internal masyarakat yang berkembang secara dinamis.

Chambers (2017) memperluas cakupan pemberdayaan dengan menambahkan dimensi keberlanjutan. Ia mendefinisikan pemberdayaan komunitas sebagai suatu pendekatan pembangunan yang berakar pada nilai-nilai

partisipasi, kepemilikan bersama, dan orientasi jangka panjang yang berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan yang bersifat inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan sosial dan ekologis.

Selanjutnya, Nasdian (2020) menegaskan bahwa pemberdayaan komunitas juga memiliki fungsi edukatif yang bersifat transformatif. Ia memandang proses pemberdayaan sebagai bentuk pendidikan non-formal yang mendorong individu dan kelompok untuk mengalami perubahan kesadaran melalui proses reflektif, sehingga mereka dapat mencapai kemandirian dan kemampuan untuk mengelola perubahan secara mandiri. Dengan demikian, pemberdayaan dipahami bukan hanya sebagai strategi teknis, tetapi juga sebagai proses pembelajaran sosial yang mendalam.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas merupakan suatu proses yang dirancang secara terstruktur dan bertujuan untuk memperkuat kapasitas kolektif masyarakat. Proses ini dilakukan melalui pengembangan aspek kesadaran kritis, pengetahuan praktis, keterampilan teknis, dan sikap partisipatif yang diperlukan agar komunitas mampu mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi, membuat keputusan yang tepat, serta mengelola potensi dan sumber daya lokal secara efektif. Dengan demikian, pemberdayaan komunitas menjadi instrumen strategis dalam mendorong kemandirian sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

### **C. Model-Model Pemberdayaan Komunitas**

Model pemberdayaan komunitas telah mengalami perkembangan seiring dengan perubahan paradigma pembangunan. Nasdian (2020) mengidentifikasi beberapa model pemberdayaan, diantaranya:

- 1) Model Pengembangan Lokal; menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi program
- 2) Model Perencanaan Sosial; berfokus pada pendekatan teknis dan rasional dalam memecahkan masalah sosial dan lingkungan.

- 3) Model Aksi Sosial; mengutamakan perubahan struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan.
- 4) Model Kombinasi; mengintegrasikan ketiga model di atas sesuai konteks dan kebutuhan masyarakat.

Suharto (2019) menambahkan model "Penta Helix" yang mengintegrasikan peran lima elemen masyarakat yaitu pemerintah, swasta, akademisi, media, dan komunitas dalam proses pemberdayaan. Model ini sangat relevan untuk pengelolaan sampah yang membutuhkan kolaborasi multi-pihak. Dalam implementasinya, pemberdayaan komunitas untuk pengelolaan sampah memerlukan strategi yang terukur. Widjajanti (2021) mengusulkan lima strategi utama: (1) pemungkinan (enabling), (2) penguatan (empowering), (3) perlindungan (protecting), (4) penyokongan (supporting), dan (5) pemeliharaan (fostering).

Dalam kajian pembangunan berbasis masyarakat, para ahli telah merumuskan beragam pendekatan konseptual yang digunakan sebagai model teoritis pemberdayaan komunitas. Pendekatan-pendekatan ini mengedepankan prinsip partisipasi, penguatan kapasitas lokal, serta transformasi sosial sebagai landasan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Beberapa model yang sering digunakan diantaranya:

- 1) Model Pengembangan Komunitas Berbasis Aset (Asset-Based Community Development/ABCD)

Kretzmann dan McKnight (1993) memperkenalkan model ABCD sebagai strategi pemberdayaan yang mengutamakan inventarisasi dan optimalisasi aset lokal dibandingkan dengan penekanan pada kekurangan atau hambatan yang dimiliki komunitas. Dalam model ini, subjek utama (komunitas) diberdayakan melalui pengenalan terhadap potensi internal seperti kapasitas kepemimpinan, keterampilan individu, jaringan organisasi warga, serta sumber daya alam lokal. Model ini secara tegas menolak ketergantungan pada intervensi eksternal, dan justru mendorong kemandirian berbasis kekuatan internal komunitas itu sendiri.

- 2) Model Pemberdayaan Multidimensional (Zimmerman, 2000)

Zimmerman mengembangkan sebuah kerangka teoritis pemberdayaan yang bersifat multidimensi yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan struktural. Terdapat tiga komponen utama dalam model ini, yakni:

- a. Intrapersonal, yang mencerminkan kepercayaan diri individu atas kapasitas dan kontrol terhadap kehidupannya sendiri.
- b. Interaksional, yang mencakup kemampuan individu memahami struktur sosial, memetakan kekuasaan, serta membangun jaringan strategis.
- c. Perilaku, yang merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menginisiasi perubahan sosial maupun lingkungan.

Ketiganya saling terkait dalam membentuk proses pemberdayaan yang komprehensif.

### 3) Model Pembangunan Berbasis Komunitas (Community-Based Development/CBD)

Model CBD menekankan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. World Bank (1996) menyatakan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, memperkuat aspek keberlanjutan, dan mendorong akuntabilitas publik karena memberikan rasa memiliki terhadap proses dan hasil pembangunan. Model ini banyak diterapkan dalam konteks pembangunan desa, konservasi lingkungan, dan pengelolaan sumber daya lokal.

### 4) Model Transformasional

Menurut Nasdian (2020), pemberdayaan komunitas harus dipahami sebagai suatu proses pendidikan sosial yang bersifat transformatif. Melalui pendekatan pembelajaran non-formal dan partisipatif, masyarakat didorong untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap kondisi struktural yang membatasi mereka, sekaligus memperkuat kemandirian kolektif. Model ini menekankan pentingnya refleksi, dialog, dan

perubahan cara pandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan pemberdayaan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

Eade dan Williams (1995) menegaskan bahwa model pemberdayaan komunitas yang efektif harus didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental. Pertama, partisipasi aktif menuntut keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap tahap proses pemberdayaan. Kedua, prinsip keadilan sosial mengharuskan program pemberdayaan memiliki sensitivitas terhadap berbagai bentuk ketimpangan dan ketidakadilan dalam struktur sosial. Ketiga, aspek kemandirian menekankan bahwa tujuan akhir dari pemberdayaan adalah tercapainya kemampuan komunitas dalam mengelola kehidupannya secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak luar. Keempat, penguatan kapasitas mengimplikasikan bahwa proses pemberdayaan perlu disertai dengan upaya sistematis dalam meningkatkan keterampilan teknis, pengetahuan substantif, dan sikap kritis masyarakat.

#### **D. Pengelolaan Sampah Yang Terintegrasi**

##### **1. Konsep dan Hierarki Pengelolaan Sampah**

Pendekatan pengelolaan sampah yang terintegrasi mengacu pada sistem yang bersifat menyeluruh, berjenjang, dan berkelanjutan dalam mengatur seluruh tahapan pengelolaan limbah, mulai dari titik asal timbulan sampah hingga tahap akhir pemrosesan (Tchobanoglous & Kreith, 2018). Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengklasifikasikan proses pengelolaan sampah ke dalam dua kategori utama, yaitu kegiatan pengurangan yang meliputi prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dan kegiatan penanganan yang mencakup proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir.

Sementara itu, Zaman (2016) mengemukakan bahwa hierarki pengelolaan sampah terdiri atas beberapa tingkatan prioritas penanganan limbah yang berorientasi pada keberlanjutan. Hierarki tersebut dimulai dari **pencegahan timbulan sampah** sebagai langkah paling utama, diikuti oleh **minimisasi limbah**,

**penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle),** serta **pemulihan energi (energy recovery)**. Tahapan terakhir adalah **pembuangan akhir (disposal)**, yang menjadi pilihan terakhir jika seluruh upaya sebelumnya tidak memungkinkan. Hierarki ini menekankan pentingnya pendekatan preventif dan sirkular dalam sistem pengelolaan sampah untuk mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Pendekatan hierarkis ini memberikan prioritas pada opsi pengelolaan sampah yang memiliki dampak lingkungan paling rendah dan efisiensi sumber daya paling tinggi.

## 2. Paradigma Zero Waste

Pendekatan **zero waste** merepresentasikan suatu paradigma komprehensif yang berupaya menghapuskan timbulan sampah melalui transformasi menyeluruh dalam sistem produksi dan pola konsumsi (Connett, 2018). Konsep ini menitikberatkan pada pentingnya **perancangan ulang** produk dan proses industri guna mencegah terbentuknya limbah, sekaligus mengoptimalkan **pemanfaatan kembali** sumber daya dari limbah yang telah dihasilkan.

Murray (2019) menguraikan bahwa strategi zero waste bertumpu pada lima komponen utama, yaitu: (1) inovasi desain produk yang ramah lingkungan, (2) penegakan tanggung jawab produsen terhadap siklus hidup produk, (3) pembangunan infrastruktur pengelolaan dan daur ulang yang memadai, (4) penerapan kebijakan insentif ekonomi yang mendorong perilaku berkelanjutan, serta (5) transformasi perilaku konsumen ke arah konsumsi yang lebih bijak.

Dalam kerangka pemberdayaan komunitas, paradigma ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam meninjau kembali cara mereka mengelola konsumsi dan limbah, sehingga memperkuat kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab ekologis. Sejumlah penelitian internasional telah menunjukkan keberhasilan implementasi pendekatan zero waste pada tingkat komunitas di berbagai negara (Zaman & Lehmann, 2017; Song et al., 2018), yang dapat menjadi rujukan berharga dalam pengembangan model serupa di Kabupaten Sumenep.

## **E. Jenis dan Karakteristik Sampah Organik dan Anorganik**

Sampah organik merujuk pada limbah yang berasal dari makhluk hidup dan memiliki sifat mudah terurai melalui proses biologis alami yang melibatkan aktivitas mikroorganisme (Damanhuri & Padmi, 2019). Di wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Sumenep, jenis sampah ini merupakan komponen dominan dalam timbulan sampah harian, dengan estimasi proporsi mencapai 60 hingga 70 persen dari total volume sampah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

Pengolahan limbah organik telah banyak dikembangkan, mulai dari teknologi sederhana berbasis rumah tangga hingga sistem terintegrasi berskala komunitas. Diener et al. (2016) mengidentifikasi beberapa teknologi yang sesuai untuk penerapan di tingkat masyarakat, antara lain:

- a. Pengomposan, yaitu proses biologis terkontrol yang mengubah sampah organik menjadi pupuk alami;
- b. Biodigester, alat yang menghasilkan biogas melalui fermentasi anaerobik bahan organik;
- c. Teknologi Black Soldier Fly (BSF), yang memanfaatkan larva lalat tentara hitam untuk mengkonversi limbah menjadi pakan ternak dan kompos;
- d. Vermikomposting, yakni teknik pemrosesan limbah organik dengan menggunakan cacing tanah.

Dalam hasil penelitian Zurbrugg et al. (2017) dijelaskan bahwa pengelolaan limbah organik tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi yang layak untuk dikembangkan di tingkat komunitas.

#### **F. Strategi Lingkungan Berbasis Partisipasi Masyarakat**

Pengelolaan lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat merujuk pada strategi yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan lingkungan. Konsep ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat untuk berkontribusi dalam tahap perencanaan serta pelaksanaan kebijakan lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang berbasis partisipasi ini diharapkan akan menghasilkan solusi yang lebih efektif dan

berkelanjutan, karena adanya peran serta langsung dari masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

Strategi lingkungan berbasis partisipasi masyarakat telah menjadi pendekatan yang semakin populer dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, pengelolaan lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat telah menjadi pendekatan yang semakin diakui dalam praktik pembangunan berkelanjutan. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh pengelolaan sumber daya alam, seperti kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial, menuntut munculnya strategi yang lebih inklusif dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan mengacu pada peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan (Borrini-Feyerabend et al., 2000).

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan dengan memanfaatkan pengetahuan lokal, memperkuat ketahanan sosial, dan menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi sosial-ekologis setempat (Chambers, 1997).

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi aspek sosial, politik, dan ekonomi kehidupan mereka dikenal dengan sebutan partisipasi masyarakat. Arnstein (1969) dalam "A Ladder of Citizen Participation" mengklasifikasikan partisipasi ke dalam beberapa tingkatan, mulai dari bentuk partisipasi yang bersifat simbolik seperti manipulasi, hingga level tertinggi berupa pemberdayaan yang sejajar dengan kekuasaan. Pada level yang lebih tinggi, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi turut memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan mengendalikan arah kebijakan. Tingkat partisipasi yang demikian berkontribusi pada terbentuknya rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keputusan bersama, yang menjadi faktor kunci dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Strategi pengelolaan lingkungan yang mengedepankan partisipasi masyarakat bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam

mengambil peran aktif. Menurut Schugurensky (2003) pemberdayaan merupakan suatu proses yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dalam mengambil keputusan terkait lingkungan hidup mereka. Melalui proses ini, tidak hanya efektivitas pengelolaan sumber daya alam yang meningkat, tetapi juga tumbuhnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan.

Chambers (1997) menyatakan bahwa dalam kerangka pengelolaan lingkungan, pengetahuan lokal masyarakat memiliki peran strategis dalam memperkuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekologi setempat. Pendekatan partisipatif dalam pengelolaan lingkungan tidak hanya memosisikan masyarakat sebagai pihak yang menerima hasil kebijakan, tetapi juga melibatkan mereka secara aktif dalam proses penentuan prioritas, perumusan kebijakan, hingga pengawasan pelaksanaannya.

Redclift (2005) menekankan bahwa konsep keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan harus dilihat secara holistik, mencakup tidak hanya dimensi ekologis, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan lingkungan yang mengintegrasikan keadilan sosial dan inklusi ekonomi memiliki potensi untuk mencapai keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi sumber daya alam. Dalam hal ini, keterlibatan aktif masyarakat menjadi elemen krusial untuk menjamin bahwa kebijakan yang diterapkan bersifat ekologis sekaligus menjunjung keadilan bagi komunitas lokal.

Pendekatan lingkungan yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai inti strategi memberikan potensi signifikan dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan mendorong pemberdayaan komunitas serta mengakui nilai pengetahuan lokal, strategi ini mampu merespons tantangan sosial dan ekologis secara lebih kontekstual. Meskipun pelaksanaannya sering dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan kapasitas dan hambatan struktural, pendekatan ini tetap menjadi elemen krusial dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang.

## **G. Kerangka Pemikiran**

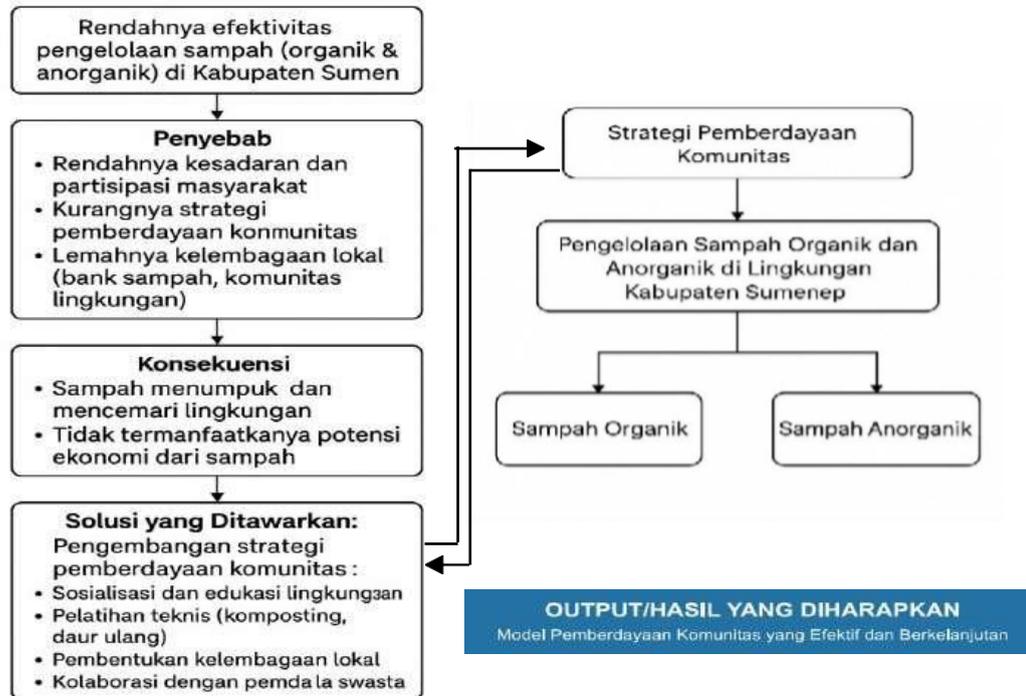
Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang kompleks dan terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas manusia, baik di wilayah urban maupun rural. Di Kabupaten Sumenep, permasalahan sampah rumah tangga, baik organik maupun anorganik, menjadi isu strategis yang memerlukan pendekatan berbasis komunitas sebagai pelaku utama pengelolaan lingkungan.

Pendekatan *top-down* yang selama ini digunakan dalam pengelolaan sampah kerap mengalami keterbatasan dalam hal efektivitas dan keberlanjutan. Sebaliknya, pendekatan *bottom-up* yang berbasis pada pemberdayaan komunitas telah terbukti mampu meningkatkan partisipasi, kepemilikan, dan tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara berkelanjutan (Chambers, 1995; Rifai, 2021).

Pemberdayaan komunitas merupakan proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok masyarakat dalam mengenali potensi dan sumber daya lokal, mengorganisasi diri, serta mengambil tindakan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan mereka (Ife & Tesoriero, 2006). Dalam konteks pengelolaan sampah, strategi pemberdayaan mencakup pendidikan lingkungan, pelatihan keterampilan pengelolaan sampah (seperti komposting dan daur ulang), penguatan kelembagaan lokal (seperti bank sampah atau kelompok swadaya), serta dukungan kebijakan dan infrastruktur.

Kerangka pemikiran ini berangkat dari kerangka hubungan sebab-akibat (kausalitas), yakni bahwa rendahnya efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep disebabkan oleh kurangnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dengan mengembangkan strategi pemberdayaan komunitas yang mencakup aspek sosial, edukatif, teknis, dan kelembagaan, diharapkan pengelolaan sampah organik dan anorganik dapat dilakukan secara lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dipaparkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada strategi-strategi pemberdayaan komunitas yang diterapkan dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik di Kabupaten Sumenep. Fokus utama mencakup:

1. Identifikasi bentuk-bentuk pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan sampah, baik dari sisi kelembagaan, partisipasi masyarakat, maupun dukungan kebijakan.
2. Analisis efektivitas strategi yang diterapkan, termasuk pendekatan edukasi, ekonomi (seperti bank sampah atau daur ulang bernilai jual), dan sosial budaya dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
3. Evaluasi peran aktor-aktor lokal, seperti pemerintah desa, LSM, komunitas lingkungan, dan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.
4. Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan komunitas untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Sumenep.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan Kecamatan Batuan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan rasional. Pertama, Kecamatan Batuan merupakan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) satu-satunya yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep, sehingga menjadi titik sentral dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah ini. Keberadaan TPA tersebut menjadikan Kecamatan Batuan sebagai wilayah yang strategis untuk mengamati secara langsung dinamika pengelolaan sampah, baik dari aspek teknis, sosial, maupun kebijakan.

Kedua, di wilayah ini telah berkembang beberapa inisiatif pemberdayaan komunitas yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan sampah, termasuk upaya pemilahan sampah organik dan anorganik, program daur ulang, serta penguatan kapasitas kelembagaan lokal. Ketiga, dengan karakteristik sosial masyarakat yang beragam dan partisipatif, Kecamatan Batuan menyediakan konteks yang representatif untuk menelusuri efektivitas strategi pemberdayaan dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

### C. Sumber Data

Penelitian ini didanai oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Sumenep melalui program pendanaan riset terapan daerah tahun anggaran 2025. Dukungan dana dari BRIDA Sumenep ini ditujukan untuk mendorong penelitian yang bersifat solutif dan aplikatif dalam menjawab permasalahan lingkungan lokal, khususnya dalam penguatan strategi pemberdayaan komunitas di bidang pengelolaan sampah. Pendanaan mencakup biaya operasional penelitian, pengumpulan data lapangan, serta penyusunan laporan hasil penelitian.

### D. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan instrumen utama berupa pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen-instrumen tersebut dirancang untuk menggali secara mendalam strategi pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan sampah, serta peran para aktor yang terlibat di Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Instrumen penelitian ini dapat dijabarkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

No	Sub Fokus Penelitian	Indikator pengamatan/ wawancara	Teknik Pengumpulan Data	Instrumen
1	Bentuk pemberdayaan komunitas	✓ Jenis kegiatan pemberdayaan ✓ Model pendekatan (edukatif, ekonomis, partisipatif)	Wawancara, observasi	Pedoman wawancara, lembar observasi
2	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	✓ Jumlah warga yang terlibat ✓ Bentuk partisipasi (aktif/pasif)	Wawancara, observasi	Pedoman wawancara, lembar observasi
3	Peran lembaga/aktor	✓ Keterlibatan pemerintah desa,	Wawancara	Pedoman

	local	komunitas, dan LSM ✓ Sinergi antar lembaga		wawancara
4	Proses pengelolaan sampah organik dan anorganik	✓ Sistem pemilahan ✓ Pengumpulan dan pengolahan sampah	Observasi, dokumentasi	Lembar observasi, dokumentasi
5	Tantangan dan kendala pemberdayaan	✓ Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ✓ Dukungan/kekurangan sarana	Wawancara, dokumentasi	Pedoman wawancara, dokumentasi
6	Dampak pemberdayaan terhadap kesadaran	✓ Perubahan perilaku terhadap sampah ✓ Inisiatif warga terhadap lingkungan	Wawancara	Pedoman wawancara

### E. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pemberdayaan komunitas dan pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Subjek dipilih secara purposive berdasarkan peran, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam kegiatan pengelolaan sampah dan program pemberdayaan.

Adapun subjek penelitian ini meliputi:

1. Perangkat Desa/Lurah, sebagai pengambil kebijakan tingkat lokal dan penanggung jawab program lingkungan.
2. Tokoh Masyarakat/Agama, berperan dalam memengaruhi sikap dan partisipasi warga terhadap kegiatan pengelolaan sampah.
3. Anggota Komunitas/Bank Sampah, individu yang aktif dalam kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah di tingkat komunitas.
4. Warga Masyarakat (responden umum), masyarakat yang menjadi sasaran dari strategi pemberdayaan, baik yang aktif maupun pasif dalam program.
5. Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan BRIDA Sumenep, sebagai pelaksana kebijakan dan pendukung riset serta program pemberdayaan berbasis inovasi daerah.
6. LSM atau Kelompok Peduli Lingkungan, pihak eksternal yang mendampingi atau memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan **kualitatif deskriptif**, sehingga teknik pengumpulan data difokuskan pada eksplorasi mendalam terhadap strategi pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan sampah organik dan anorganik di lingkungan Kabupaten Sumenep, khususnya Kecamatan Batuan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)**

Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi dari informan kunci seperti perangkat desa, pengelola bank sampah, tokoh masyarakat, warga, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan BRIDA Sumenep. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki fleksibilitas untuk menelusuri data yang muncul secara spontan selama proses tanya jawab berlangsung.

Menurut Lexy J. Moleong (2017:186), “wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.” Teknik ini penting untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta sikap subjek terhadap proses pemberdayaan dan pengelolaan sampah.

### **2. Observasi Partisipatif**

Observasi dilakukan untuk memperoleh data empiris dari aktivitas di lapangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan keterlibatan masyarakat. Peneliti mencatat aktivitas warga dalam memilah, mengolah, atau mendistribusikan sampah, serta meninjau langsung fasilitas seperti bank sampah, tempat pelatihan, atau TPA.

Spradley (1980:54) menjelaskan bahwa “participant observation is a process of learning through exposure to or involvement in the day-to-day or routine activities of participants in the research setting.” Teknik

ini memungkinkan peneliti memahami tindakan sosial dalam konteks alami.

### 3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan kegiatan pengelolaan sampah, catatan pelatihan, peraturan desa tentang lingkungan, serta foto-foto kegiatan masyarakat.

Sugiyono (2019:240) menyatakan bahwa “dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.” Studi dokumentasi berguna untuk menguatkan dan menguji kebenaran data hasil wawancara maupun observasi.

### 4. Studi Literatur

Selain teknik-teknik lapangan, peneliti juga menggunakan studi literatur untuk menelaah teori-teori terkait pemberdayaan komunitas, pengelolaan sampah, serta praktik baik di tempat lain sebagai bahan perbandingan dan dasar analisis. Literatur yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah, buku teks, laporan lembaga, dan artikel penelitian yang relevan.

## G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan **kualitatif deskriptif** yang bersifat induktif. Teknik analisis data dilaksanakan secara simultan dengan proses pengumpulan data dan mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh **Miles, Huberman, dan Saldana**. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu: **reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi**.

### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti bentuk

strategi pemberdayaan komunitas, partisipasi masyarakat, hingga tantangan dalam pengelolaan sampah. Proses ini bertujuan menyusun informasi yang kompleks menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:12), “*data reduction refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions.*” Reduksi data dalam penelitian ini bersifat terus-menerus sejak awal hingga akhir proses penelitian.

## 2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks tematik, tabel kategorisasi, serta kutipan langsung dari hasil wawancara. Penyajian ini membantu peneliti melihat hubungan antar tema, pola partisipasi, serta dinamika pemberdayaan komunitas dalam konteks pengelolaan sampah.

Seperti dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014:13), “*a display is an organized, compressed assembly of information that permits conclusion drawing and action.*” Penyajian data ini penting agar informasi dapat ditangkap secara utuh oleh peneliti sebelum mengambil kesimpulan.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Tahap terakhir adalah proses penarikan kesimpulan berdasarkan pola, kategori, dan hubungan antar data yang telah dianalisis. Peneliti terus-menerus melakukan verifikasi terhadap temuan dengan cara membandingkan antar sumber data (triangulasi), meminta klarifikasi ulang kepada informan (member check), serta mencocokkan temuan dengan teori dan konteks.

Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) menyatakan bahwa “*conclusion drawing involves stepping back to consider what the analyzed data mean and to assess their implications for the questions at hand.*” Dengan

demikian, proses analisis tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga reflektif dan kritis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- \_\_\_\_\_. (2019). *Partisipasi warga dalam pembangunan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Borrini-Feyerabend, G., Pimbert, M., Farvar, M. T., Kothari, A., & Renard, Y. (2000). *Co-management of natural resources: Organising, negotiating and learning-by-doing*. Kasperek Verlag.
- Chambers, R. (1995). *Rural development: Putting the last first*. Intermediate Technology Publications.
- \_\_\_\_\_. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Ideas for development*. Earthscan.
- Connett, P. (2018). *The zero waste solution: Unrashing the planet one community at a time*. Chelsea Green Publishing.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2019). *Pengelolaan sampah*. ITB Press.
- Diener, S., et al. (2016). A value proposition: Resource recovery from faecal sludge—Can it be the driver for improved sanitation? *Resources, Conservation and Recycling*, 108, 32–38.
- Eade, D., & Williams, S. (1995). *The Oxfam handbook of development and relief*. Oxfam GB.
- Friedmann, J. (2018). *Planning in the public domain: From knowledge to action*. Princeton University Press.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2006). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation* (3rd ed.). Pearson Education.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation* (5th ed.). Pearson Education Australia.

- Jambeck, J. R., et al. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science*, 347(6223), 768–771.
- Kabar Madura. (2023). Hanya kreatif menumpuk sampah. Diakses dari: <https://kabarmadura.id/hanya-kreatif-menumpuk-sampah/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). *Sistem informasi pengelolaan sampah nasional (SIPSN)*. KLHK.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. Diakses dari: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Media Jatim. (2023). TPA di Sumenep overload, per hari sampah mencapai 33,32 ton. Diakses dari: <https://mediajatim.com/2023/05/11/tpa-di-sumenep-overload-per-hari-sampah-mencapai-3332-ton/>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Murray, R. (2019). *Creating wealth from waste: Recycling and resource management in the UK*. Demos.
- Nasdian, F. T. (2020). *Pemberdayaan masyarakat: Teori dan praktik*. Kencana.
- NPAP. (2022). *Indonesia's plastic action roadmap*. Indonesia National Plastic Action Partnership.
- Purwendro, A., & Nurhidayat, D. (2017). Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 12–21.

- Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121–148.
- Redclift, M. (2005). Sustainable development (1987–2005): An oxymoron comes of age. *Sustainable Development*, 13(4), 212–227.
- Rifai, H. (2021). *Pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan lingkungan berbasis partisipatif*. Deepublish.
- Schugurensky, D. (2003). The forms of informal learning: Towards a conceptualization of the field. *New Approaches for Lifelong Learning (NALL) Working Paper #19*. Ontario Institute for Studies in Education.
- Song, Q., Li, J., & Zeng, X. (2018). Minimizing the increasing solid waste through zero waste strategy. *Journal of Cleaner Production*, 195, 476–484.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2019). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. PT Refika Aditama.
- Swift, C., & Levin, G. (1987). *Empowerment: An emerging mental health technology*. Haworth Press.
- Tchobanoglous, G., & Kreith, F. (2018). *Handbook of solid waste management* (3rd ed.). McGraw-Hill Education.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Wegi Trio Putra, & Ismaniar. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di bank sampah. Diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/347330-pemberdayaan-masyarakat-melalui-pengelol-83e2fab4.pdf>
- Widjajanti, K. (2021). *Strategi pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat*. UGM Press.

- World Bank. (1996). *The World Bank participation sourcebook*. World Bank Publications.
- Yayasan Indonesia Bersih. (2023). *Studi evaluasi kapasitas TPA di Indonesia*.
- Zaman, A. U. (2016). A comprehensive study of the environmental and economic benefits of resource recovery from global waste management systems. *Journal of Cleaner Production*, 124, 41–50.
- Zaman, A. U., & Lehmann, S. (2017). The zero waste index: A performance measurement tool for waste management systems in a “zero waste city”. *Journal of Cleaner Production*, 50, 123–132.
- Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 581–599.
- \_\_\_\_\_. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational and community levels of analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of community psychology* (pp. 43–63). Springer.
- Zurbrugg, C., et al. (2017). Determinants of sustainability in solid waste management—The Gianyar Waste Recovery Project in Indonesia. *Waste Management*, 67, 112–121.
- Integrity News. (2024). 7 kecamatan di Sumenep produksi 36 ton sampah per hari, DLH akan bangun TPST. Diakses dari: <https://integritynews.com/7-kecamatan-di-sumenep-produksi-36-ton-sampah-per-hari-dlh-akan-bangun-tpst/>



